Kisruh DPT dalam Pilpres 2009: Studi Analisis Isi Pada Suratkabar Nasional dan Lokal

Oleh: Habib Muhsin*

Abstract

General Election Commission (KPU) as general election organizer has duty and authority in practising president and vice president election at 8 June 2009 in Indonesia. One of the phenomenon in general election of president and vice president at that time is the conflict List of Voters Permanent (Daftar Pemilih Tetap/DPT) . This study describes DPT problems by national and local newspapers in Indonesia. The objectives of this study are directed to know the content conflict of DPT news in local and national newspapers. These findings of content analysis conducted in this study indicate the conflict of DPT influence negative quality in general election of presiden and vice president 2009.

Key words: *Election, voters, newspapers, conflict*

Pendahuluan

Reformasi bidang politik di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang cukup fundamental dalam ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu klausul dalam amandemen konstitusi tersebut ialah bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sejak pemilu tahun 2004 dan kemudian pemilu 2009 rakyat Indonesia menyaksikan dan mengalami pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang dipilih secara langsung.

Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Penyelenggaraan pemilu secara reguler lima tahunan merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan negara pada masa lalu dan masa datang.

Makna pilpres yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan (pemerintah) berdasarkan regulasi, norma, dan etika, sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab. Institusi pemilu merupakan produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan. Dalam sejarah demokrasi, pemilu yang teratur merupakan cara damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum menghindarkan penggunaan kekerasan berdarah dalam menggantikan pemerintah berkuasa yang sudah tidak lagi dikehendaki rakyat.

Oleh karena itu, proses pilpres diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberikan jaminan agar pilpres tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga dapat menghasilkan pemimpin yang memilki kredibilitas, akuntabilitas, dan kapabilitas tinggi, serta sanggup mengemban amanah dan kehormatan dari rakyat dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jika

* ***Dosen Tetap Jurusan Ilmu Komunikasi STPMD Yogyakarta, Alumni Magister Komunikasi Pembangunan IPB***

pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak dapat menjalankan amanah rakyat, maka rakyat dapat menghukumnya dengan tidak memilih mereka pada pilpres berikutnya.

Setidaknya ada empat fungsi pemilu (Hikam, 1999:16) antara lain: Legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah/ penguasa dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi atau kewenangan tertinggi untuk mengatur legislasi dan fungsi-fungsi yudisial.

Pemilu 2009 bukanlah untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat, karena sudah diawali pada pemilu 2004. Pemilu 2009 yang diawali dengan pemilu legislatif pada tanggal 9 April yang lalu ternyata tidak lepas dengan carut marut penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses sosialisasi mekanisme dari ”mencoblos” ke ”mencontreng” sampai pada kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kemudian pada pemilu presiden (pilpres) yang sudah terselenggara pada tanggal 8 Juli 2009 yang lalu ternayata juga masih dilingkupi dengan kisruh DPT yang menimbulkan respon negatif terhadap penyelenggaraan pilpres 2009. Problem DPT seakan menjadi warna tersendiri dalam dua pemilu, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sering munculnya konflik data pemilih membuktikan bahwa belum adanya evaluasi secara total dan komprehensif unatuk mencari akar persoalan yang sejatinya.

DPT dalam pilpres itu sendiri sebenarnya sudah melalui mekanisme yang panjang karena semua pemilih dalam pemilu legislatif yang lalu digunakan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Kemudian DPS itu akan diumumkan kepada masyarakat untuk dimintakan tanggapannya. Warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPS diharapkan secara proaktif mendaftarkan diri ke PPS setempat atau melalui RT untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT). Selanjutnya, DPS ditambah dengan daftar pemilih tambahan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun kenyataanya tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena masih banyaknya jumlah warga masyarakat yang tercecer tidak masuk dalam DPT pilpres dan itu sifatnya merata di setiap wilayah. Bahkan salah kubu dalam pilpres tersebut menganggap kisruh DPT sebagai bentuk kecurangan yang sistematis untuk memenangkan salah satu kubu rivalnya. Berdasarkan laporan dari kubu Mega Prabowo terdapat nama-nama ganda dalam DPT sebesar 7.653.210 pemilih dan jumlah ini akan terus bertambah (Radar Jogja, 11 Juli 2009).

Seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat mengambil pelajaran dari kasus yang sama pada pemilu legislatif sebelumya. Sukses pilpres sebenarnya ditandai dengan beberapa parameter. Pelaksanaan pilpres harus ditandai oleh nilai-nilai yang telah diterima secara umum. Suksesnya pilpres tidak ditentukan oleh siapa yang menang atau kalah, tetapi apakah pemilu dilaksanakan secara fair, jujur, adil, transparan, di bawah institusi penyelenggara yang benar-benar netral.

Berpijak dari uraian di atas, maka kajian tentang analisis isi media cetak tentang kisruh DPT dalam pilpres 2009 menjadi menarik untuk dikaji. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab sejumlah permasalahan yang diajukan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana persoalan kisruh DPT dalam pilpres 2009 yang dimuat di media cetak? *Kedua*, bagaimana implikasi persoalan kisruh DPT bagi kualitas pilpres 2009?

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui persoalan-persoalan DPT dalam pilpres 2009 yang dimuat di berbagai media surat kabar. Adapun tujuan kajian ini adalah memperoleh gambaran yang lebih luas dan lengkap tentang DPT dalam pilpres 2009 dan berbagai persoalan yang muncul dengan memperhatian berbagai aspirasi dari masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Metode Analisis

Dalam kajian ini metode yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu analisis untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang melalui surat kabar (Jalaluddin Rakhmat, 1999:89). Sifat penelitian lebih menekankan pada deskriptif kualitatif, yaitu mendasarkan pada intrepretasi/ penafsiran (Alex Sobur, 2001:70) dengan mengungkap fakta yang tersurat dan tersirat dalam pemberitaan surat kabar tentang DPT pilpres 2009.

Dalam kajian ini data diambil dari surat kabar nasional dan lokal yang mengangkat pemberitaan tentang DPT dalam pilpres 2009. Adapun surat kabar yang diteliti adalah surat kabar nasional meliputi Kompas dan Republika, sedangkan surat kabar lokal meliputi Kedaulatan Rakyat, Bernas, Harian Jogja, Radar Jogja, dan Suara Merdeka yang terbit tanggal 1 sampai 11 Juli 2009. Kajian ini juga mengambil sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap isi pemberitaan tentang DPT pilpres yang dimuat di surat kabar yang menjadi sample. Data sekunder diperoleh dari literatur bacaan dan akses melalui internet yang terkait dengan DPT pilpres 2009.

Tinjauan Pustaka

Beberapa studi tentang demokrasi mengukuhkan pandangan bahwa pemilu merupakan salah satu alat penting untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara. Dalam Analisis LeDuc dan kawan-kawan (1996), pemilu merupakan instutusi politik yang mengarahkan dan merefleksikan berbagai tendensi ekonomi, politik, dan sosial, sehingga masa depan demokrasi bergantung pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan proses pemilihan umum tersebut.

Melalui proses pemilu diharapkan akan dapat terwujud suatu mekanisme yang mampu menjamin pergantian kekuasaan (transfer of power) dan kompetensi kekuasaan (power competition) di suatu negara secara damai dan beradab. Oleh karena itu, proses pemilu datur dalam kerangka regulasi dan etika sehingga berlangsung secara jujur dan adil dan memilih pemimpin yang memiliki kredibilitas, akuntabilitas, dan kapabilitas yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kajian ini peneliti melakukan analisis terhadap berita tentang isu-isu DPT dalam pilpres 2009 dimuat di media massa khususnya surat kabar, dua surat nasional dan lima surat kabar lokal. Penyampaian pesan melaui media massa akan berakibat pada terpengaruhnya massa baik secara langsung maupun tidak, akan menunjukkan bahwa betapa proses komunikasi massa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Denis Mc Quail (1987:40) mengatakan media massa merupakan serangkaian kegiatan produksi budaya dan informasi yang dilakukan oleh berbagai tipe komunikasi massa untuk disalurkan kepada khalayak, sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku.

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi yang telah dihasilkan oleh media atau jurnalis, dengan menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengamatan-pengamatan isi media guna mengkaji pesan-pesan media melalui teknik penelitian. Adapun analisis isi menurut Bernard Berelson adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (manifest), (Klaus Krippendorf, 1993:16).

Sedangkan pengertian suratkabar adalah suatu media yang penerbitannya berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan dan iklan, yang dicetak dan terbit secara tetap dan

periodik dan dijual untuk umum (Assegaff, 1983:140). Sementara Menurut Jacob Oetama, suratkabar adalah kesatuan antara bentuk konfigurasi atau pola dan isi lebih dari sekedar bentuk dalam arti wajah, namun yang mengandung seuntai nilai-nilai. Nilai-nilai itu akan membangun visi (kerangka pandang) yang menjadi semacam kacamata bagaimana wartawan melihat suatu kejadian memberikan makna atau melekatkan tekanan pada kejadian itu. (1996:241).

Khalayak penerima pesan yang disajikan media surat kabar adalah sama seperti khalayak penerima pesan dari media massa yang lainnya, khalayak media massa yang luas dengan status sosial dan tingkat usia yang berbeda. Semua khalayak mempunyai hak untuk menerima pesan dari media massa baik media cetak maupun media massa elektronik.

Berita merupakan bagian yang paling penting dalam surat kabar karena lebih dari 90% isi dari sebuah surat kabar adalah berita. Berita menurut Williard C. Bleyer adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena ia menarik atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut (Assegaff, 1993:23). Dalam kajian ini unit analisisnya adalah berita-berita yang berkaitan dengan kisruh DPT pilpres 2009 yang dimuat di beberapa surat kabar.

Deskripsi Pemberitaan

NO	SURAT KABAR	ISI PEMBERITAAN
1.	Kompas, 2 Juli 2009	**KPU HARUS BUKA DPT** - Enam hari menjelang pemilu presiden, daftar pemilih tetap (DPT)) yang seharusnya bukan menjadi dokumen rahasia Negara nyatanya masih menjadi dokumen misterius. - Banyak pihak menilai sulit mengakses DPT pilpres - Persoalan dalam kasus DPT: pemilih ganda, sudah meninggal masih tercatat di DPT, anggota TNI/Polri terdaftar masuk DPT
2.	Harjo, 2 Juli 2009	**PANWASLU ANCAM KASUSKAN KPUD** - Panwaslu Gunungkidul menemukan DPT pilpres tidak akurat dan meragukan jumlah DPT yang ditetapkan KPUD sebanyak 585.180 - Menurut Panwaslu masih banyak ditemukan nama pemilih fiktif, sudah meninggal dunia, belum cukup umur, nama ganda. - KPUD masih bersikukuh jumlah DPT yang sudah ditetapkan tidak akan berubah.
3.	KR, 2 Juli 2009	**PRABOWO MINTA MASALAH DPT DISELESAIKAN** - Seminggu menjelang pilpres masalah DPT belum terselesaikan. - Menurut Prabowo di Jatim ada 2 juta DPT yang belum beres. Bila dibiarkan akan mendelegitimasi hasil pilpres. - Ada sebagian pihak minta pilpres 2009 ditunda sebelum persoalan DPT terselesaikan.
4.	Radar Jogja, 2 Juli 2009	**KPU TOLAK UBAH DPT BERMASALAH** - Meski sejumlah kalangan masih mempermasalahkkan keakuratan DPT dalam pilpres, namun KPU bersikukuh bahwa DPT tidak ada masalah
5.	Radar Jogja, 2 Juli 2009	**25 WARGA PATUK TIDAK MASUK DPT** - Pada pemilu legislatif yang lalu 25 warga masuk DPT, namun pada pemilu presiden kali ini tidak masuk DPT, mereka protes kepada PPS setempat.
6.	Suara Merdeka, 2 Juli 2009	**DPT BERMASALAH, KPU MENYERAH** - Ketua KPU mengaku tidak berdaya dalam membereskan masalah DPT yang tercecer. - KPU berkomitmen akan bertanggung jawab atas seegala resiko tercecernya DPT. - Pilpres tinggal seminggu namun KPU belum mempublikasikan DPT pilpres dan KPU dianggap tidak serius.

7.	KR, 3 Juli 2009	**KREDIBILITAS DAN NETRALITAS KPU** - Kredibilitas dan netralitas KPU dipertanyakan terkait dua masalah: pertama, masalah DPT yang belum beres, kedua pemasangan spanduk sosilasisasi pilpres yang cenderung mendukung capres-cawapres tertentu. - KPU dianggap tidak menarik pelajaran dari masalah DPT pada pemilu legislatif 9 April 2009. - KPU mengakui ada kesalahan dalam pemasangan spanduk yang cenderung memihak pada salah satu calon.
8.	KR, 3 Juli 2009	**KPU BANTAH 49 JUTA PEMILIH TERCECER** - Merasa kesal dipersoalkan masalah DPT yang tercecer, anggota KPU menantang kepada anggota DPR-RI Eva Kusuma Sundari untuk membeberkan jumlah 49 juta DPT yang tercecer.
9.	Radar Jogja, 3 juli 2009	**MEGA PRABOWO KESULITAN AKSES DPT** - Setelah berusaha sejak awal Juni 2009, Tim Kampaye Mega Prabowo mengalami kesulitan dalam mengakses DPT - KPU diminta segera mempublikasikan DPT berbasis RT memalui ketua RT
10.	Republika, 3 Juli 2009	**NETRALITAS KPU** - Dalam sosialisasi pilpres KPU dinilai tidak netral, pasalnya dalam contoh mencontreng yang benar yang dijadikan contoh pada gambar yang tengah atau urutan nomor dua, sementara contoh mencontreng yang salah dibubuhkan pada gambar 1 dan 3. - Masyarakat menilai sosialisasi yang dilakukan KPU mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu.
11.	Suara Merdeka, 3 Juli 2009	**DITEMUKAN BERBAGAI PELANGGARAN DPT** - Pilpres tinggal menunggu hari, namun persoalan DPT masih belum tuntas. Pelanggaran tersebut meliputi:NIK ganda, nama dan alamat sama tapi NIK berbeda, anggota TNI/ Polri yang masih aktif masuk DPT, sudah meninggal masuk DPT.
12.	Kompas, 3 Juli 2009	**DITEMUKAN SEJUMLAH KEJANGGALAN DPT** - Ditemukan sejumlah kejanggalan DPT dalam pilpres antara lain adanya penambahan dan pengurangan jumlah pemilih yang tidak masuk akal dibandingakn pada pemilu legislatif yang lalu. - Sejumlah tokoh agama di Jakarta menyerukan agar KPU netral dan membolehkan penggunaan KTP untuk memilih.
13.	Bernas, 4 Juli 2009	**KETUA KPU: BAYI-BAYI JADI PEMILIH** - KPU meragukan laporan ada 49 juta pemilih yang tercecer, menurut ketua KPU itu berarti termasuk bayi-bayi menjadi pemilih.
14.	KR, 4 Juli 2009	**DPT TIDAK BERES, CAPRES DIMINTA MUNDUR** - Empat pimpinan partai di DIY, PDI P, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura mendesak agar capres dan cawapres yang diusungnya untuk mundur bila persoalan DPT belum beres. Mereka khawatir bila diteruskan akan menjadi korban kebohongan.
15.	Bernas, 4 Juli 2009	**TPS KARANGMOJO RAWAN KONFLIK** - Karena sejak awal ada masalah DPT, maka sejumlah konflik akan muncul baik antar pendukung maupun saksi di tingkat TPS khusunya di TPS Karangmojo Gunung Kidul
16.	Bernas, 4 Juli 2009	**MEWUJUDKAN PILPRES YANG BERMARTABAT** - Pilpres tinggal beberapa hari, SBY dalam awal kampayenya mengharpkan agar pilpres berjalan dengan kompetensi yang sehat, berbudaya dan bermartabat . - DPT masih bermasalah, terdapat 16 propinsi yang DPT nya bermasalah, antara lain Jatim, Jabar, DIY - Indikasi persoalan meliputi: pemilih fiktif, pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih. - KPU diharapkan bersikap netral dan bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat.

17.	KR, 5 Juli 2009	**DPT BERTAMBAH, TPS BERKURANG** - Jumlah pemiliih di DIY bertambah sebanyak 29.266 pemilih dibandingkan pada pemilu legislatif. Sedangkan TPS berkurang dari 8.160 menjadi 8.049 TPS
18.	Bernas, 6 Juli 2009	**KTP SOLUSI PERSOALAN DPT** - Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, M Fadjroel Rahman menyatakan, pemanfaatkan KTP sebagai kartu pemilih bisa menjadi solusi persoalan DPT pilpres yang dinilai berbagai kalangan bermasalah.
19.	KR, 7 Juli 2009	**DIKELUHKAN, DPT PILPRES SULIT DIAKSES** - KPU Kab Sleman siap menggelar pilpres, semua logistik selesai didistribusikan. - Sementara itu DPT pilpres sampai saat ini belum bisa diakses publik dan partai.
20.	KR, 7 Juli 2009	**MK KABULKAN UJI MATERI MASALAH DPT** - MK mengabulkan permohonan uji materi UU No. 42 th 2008 terkait daftar pemilih tetap, WNI yang telah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT, bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Paspor yang masih berlaku. - Keputusan ini dinilai berbagai kalangan sebagai terobosan yang positif untuk menyelesaikan kebuntuan masalah DPT.
21.	Radar Jogja, 7 Juli 2009	**PANWASLU TEMUKAN 357 DPT BERMASALAH** - Panwaslu Bantul menemukan ratusan DPT bermasalah dengan sampel 75 TPS di Bantul. DPT bermasalah tersebut antara lain: 179 pemilih yang sudah meninggal tapi masih terdaftar, 90 pemilih dengan nama ganda, 27 pemilih sedang bekerja di luar negeri, 43 pemilih perantau di luar DIY, 7 pemilih mengalami gangguan jiwa, 11 pemilih berstatus anggota TNI/Polri. - Panwaslu kecewa dengan kinerja KPU yang terkesan tidak serius dalam menyempurnakan DPT.
22.	Harjo, 6 Juli 2009	**DPT HARUS DIPERBAIKI** - Capres JK bertemu dengan capres dari PDIP Megawati Sukarnoputri di gedung PP Muhammadiyah Jakarta bersama Din Syamsuddin, mendesak KPU menyelesaikan persoalan DPT selambat-lambatnya 1x24 jam sejak dikeluarkan pernyataan tersebut, bila tidak KPU disarankan menunda pilpres sebelum dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
23.	Radar Jogja, 7 Juli 2009	**MENGAKHIRI KONFLIK DPT PEMILU** - Sering munculnya konflik DPT membuktikan belum adanya evaluasi secara total dan komprehensif untuk mencari akar persoalan yang sejati. - KPU sebagai penyelenggara pemilu dianggap sebagai obyek kesalahan. Untuk mengakhiri persoalan tersebut sebenarkan perlu melibatkan stakeholder pemilu untuk mencari solusi pemecahannya: pemerintah, KPU, masyarakat.
24.	Kompas, 7 Juli 2009	**KHAWATIR DATA PEMILIH DIPROTES** - Hingga H-5 pelaksanaan pilpres, masih ada sebagian masyarakat DIY masih meragukan keakuratan data pemilih tetap. Menurut jajak pendapat yang dilakukan Kompas menunjukkan 57,3 % khawatir akan terjadinya protes dalam pelaksanaan pilpres nanti. Sedangkan 41,1 % menjawab sebaliknya. 1,6 % tidak tahu.
25.	Radar Jogja, 11 Juli 2009	**DPT GANDA CAPAI 7 JUTA PEMILIH** - Kubu Mega Pro membeberkan dugaan kecurangan yang ditemukan saksi-saksinya. Kecurangan itu dilakukan secara sistematis dan merata. Pihaknya menemukan nama-nama ganda dalam DPT sebesar 7.652.210. Dengan nama ganda tersebut potensial digunakan untuk kecurangan.
26.	Radar Jogja, 11 Juli 2009	**PEMILIH KTP MERATA, BUKTI KACAUNYA DPT** - Partisipasi pemilih ber KTP dalam pilpres dapat mengukur kinerja KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Menurut temuan Komite Pemilih Indonesia memperlihatkan di setiap TPS rata-rata ada 10 pemlih yang menggunakan KTP. KPU dinilai gagal dalam menyelamatkan hak warga negara.

Pembahasan: Persoalan DPT dalam Pilpres 2009

Perubahan aturan dalam perkembangan system politik di Indonesia memberikan arah baru dalam proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden sudah berlangsung dua kali, yaitu tahun 2004 dan kemudian tahun 2009 yang berlangusng 8 Juli yang lalu. Meski secara umum pelaksanaan pilpres berjalan lancar dan aman, namun kualitas pemilu dalam pilpres 2009 menurut banyak kalangan tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik dibandingkan pada pemilu legislatif 9 April yang lalu. Dari sisi jumlah pemilih sebenarnya mengalami peningkatan dibandingkan pada pemilu legislatif dari 171.265.442 juta menjadi 176.395.015 daftar pemilih tetap di pilpres 2009 (Republika, 7 Juli 2009). Sebuah angka partisipasi yang cukup besar dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 232 juta jiwa. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 pasal 224 ayat (1): pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Namun persoalan yang mencuat dalam pilpres 2009 yang lalu lagi-lagi menyangkut DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sebenarnya pernah terjadi pada pemilu legislatif yang lalu. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi kualitas dari pilpres 2009. Capres Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada awal kampanyenya mengajak agar dalam pelaksanaan pilpres dilakukan secara sehat, berbudaya, bermartabat dan dilakksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Proses menjadi DPT itu sendiri sebenarnya melalui pentahapan yang rumit, mulai dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang digunakan dalam DPT pemilu legislatif, kemudian ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan baru ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres.

Carut marut tentang DPT tidak bisa lepas dari peran KPU dan pemerintah, selaku penyelenggara pemilu. Karena kisruh DPT sendiri terjadi untuk yang kedua kalinya. Jika kedua lembaga ini mempunyai tekat yang bulat untuk dapat melaksanakan amanah rakyat. Kita tentunya sangat yakin pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama tidak akan terjadi gugatan dari kubu capres cawapres yang kalah, apalagi kalau terjadi kubu yang kalah tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi KPU, maka persoalan menjadi lebih panjang.

Berdasarkan analisis melalui pemberitaan di media menunjukkan ketidaksiapan KPU dalam menangani kisruh DPT. Empat hari menjelang pipres masih ada 16 propinsi yang DPT nya bermasalah, seperti di Jawa Timur, Jawa barat, DIY, Jakarta dan propinsi-propinsi lainnya. Persoalan yang muncul antara lain: pemilih fiktif, pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, anggota TNI/Polri yang masih aktif masuk dalam DPT, meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT. Ketua Fraksi PDIIP Tjahyo Kumolo misalnya menilai KPU sangat arogan, karena tidak memperdulikan berbagai sorotan masyarakat tentang persoalan kisruh DPT, bahkkan menurut anggota DPR RI PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan ada 49 juta pemilih yang tercecer secara merata di Papua dan Sulawesi tidak masuk dalam DPT. Kubu JK-Wiranto pun juga menilai terjadi kecurangan sistematis untuk memenangkan SBY Budiono.

Kisruh DPT pun juga merata di berbagai daerah di termasuk di DIY, di Gunung Kidul misalnya berdasarkan temuan dari Panwaslu Gunungkidul masih banyaknya pemilih fiktif termasuk diantaranya orang meninggal dunia dan pemilih di bawah umur dicantumkan dalam data. Di TPS 9 Desa Ngipak Kec. Karangmojo, Panwaslu menemukan DPT yang kelebihan 100 orang. Di Yogyakarta juga terjadi kerancuan DPT, menurut Ketua Panwaslu DIY

menemukan 500 DPT bermasalah, antara lain: DPT ganda, sudah meninggal dunia, dan anggota TNI/Polri aktif masuk dalam DPT. Di kabupaten lain di DIY juga mengalami hal yang sama. Dari total DPT bermasalah di DIY mencapai 61.615 DPT yang meliputi di Sleman 35.513, di Bantul 12.512, di Gunungkidul 6.976, di Kulonprogo 5.607 dan di Jogja 1.007. Besarnya jumlah DPT bermasalah di DIY menurut Eko Suwanto, Kepala Badan Diklat Kota Jogja sebagai indikasi kecurangan pemilu yang terjadi dalam skala luas.

Lepas dari indikasi bentuk kecurangan secara sistematis atau tidak yang jelas kekiruhan DPT terjadi secara merata dalam skala luas dan ini menciderai proses demokrasi yang berakibat pada menurunnya nilai keabsahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Senada diungkapkan oleh Cawapres dari Gerindra Prabowo Subiyanto, bahwa apabila persoalan DPT dibiarkan akan mendelegitimasi hasil pilpres. Bahkan pada saat itu dari kubu Wiranto muncul wacana pilpres perlu ditunda sampai persoalan DPT dituntaskan. Meski demikian penundaan pilpres akan mempunyai dampak politik yang besar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Belum lagi, hal tersebut akan berpengaruh pada kalender ketatanegaraan. Atas persoalan tersebut Ketua DPR, Agung Laksono meminta KPU tidak main-main atas banyaknya temuan kisruh DPT dan KPU harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Persoalan lain yang mencuat dalam kisruh DPT adalah kesulitan dalam mengakses DPT padahal pelaksanaan pilpres tinggal menghitung hari. Bagi tim kampanye pilpres salinan DPT dianggap sangat penting dalam rangka pengecekan lapangan. Namun nampaknya KPU tetapyakin tidak ada masalah terkait DPT pilpres (Kompas, 2 Juli 2009).

Sesuai Peraturan KPU No. 32 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Peraturan KPU No. 10 tahun 2009 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilpres 2009, PPS dan Panitia Pemungutan Luar Negeri harus mengumumkan dan memberitahukan tempat dan waktu pemungutan suara antara 24 Juni hingga 3 Juli 2009. Namun hingga tanggal 3 Juli 2009, hampir sebagian pemilih belum menerima pemberitahua itu.

Hingga enam hari menjelang pemilu presiden, DPT yang seharusnya bukan menjadi dokumen rahasia Negara, namun kenyataannya masih menjadi dokumen yang misterius. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian yang bisa dimanfaatkan menjadi alat kepentingan politik. Permintaan agar KPU segera membuka akses bagi pihak yang berkepentingan agar dapat melihat DPT pilpres datang tidak hanya dari kubu Mega Prabowo, JK Wiranto, namun juga dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Pihak-pihak yang berkepentingan itu antara lain: pengawas pemilu, tim pendudkung calon presiden dan wakil presiden, dan lembaga-lembaga pemantau yang terakreditasi. Karena dengan DPT itu, pendukung capres dan cawapres dapat memastikan pendukungnya terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan analisis melalui pemberitaan nampaknya antara kubu Tim Kampanye Mega Prabowo, JK Wiranto, lembaga pemantau, lembaga pengawas dan KPU di pihak lain selalu berbeda pendapat soal DPT. KPU menganggap persooalan DPT tidak ada masalah. Menurut Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary menilai laporan soal sulitnya akses DPT dan kisruh DPT tidak benar dan didasari data yang tidak jelas. Sementara hasil penelusuran yang dihimpun oleh tim kampanye Mega Prabowo, JK Wiranto, Panwaslu di berbagai daerah menunjukkan temuan kesalahan dalam DPT, antara lain pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia masih masuk DPT, warga yang sudah pindah domisili juga masuk DPT, anggota TNI/Polri aktif masuk DPT. Menurut data yang dihimpun oleh Litbang Kompas dan Bawaslu per 30 Mei 2009 total DPT bermasalah berjumlah 79.294 kasus yang terjadi di 11 propinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat (Kompas, 2 Juli 2009).

Persoalan lain yang melingkupi KPU selain DPT adalah menyangkut netralitas KPU. Spanduk sosialisasi pilpres dinilai berbagai pihak mengindikasikan dukungan KPU pada salah satu pasangan capres cawapres tertentu. Spanduk tersebut dinilai tidak lazim karena alat peraga yang digunakan untuk mencontreng contoh yang benar dibubuhkan pada nomor 2, sedangkan contoh yang salah dibubuhkan pada nomor 1 dan 3. Masyarakat umum akan membaca bahwa contoh pencontrengan seperti itu tidak lain untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu. KPU sebagai badan independent seharusnya netral dalam pemilu, tetapi indikasi yang terlihat sekarang ini memperlihatkan bahwa kenetralan KPU di pertanyakan.

Kacaunya persoalan DPT juga dibuktikan dengan meratanya pemilih yang menggunakan KTP pasca dikabulkannya uji materi masalah DPT oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Dalam hal ini MK mengabulkan permohonan uji materi UU No, 42 tahun 2008 satu hari sebelum pelaksanaan pilpres. Bagi WNI yang telah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menujukkan KTP atau Paspor yang masih berlaku. Menurut pantauan Komite Pemilih Indonesia di 26 Kabupaten/Kota di 19 propinsi ditemukan rata-rata 10 pemilih menggunakan KTP di setiap TPS (Radar Jogja, 11 Juli 2009). Data ini menujukkan bukti masih kacaunya persoalan DPT.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang kisruh DPT dalam pilpres 2009 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, munculnya kisruh DPT secara merata dalam pilpres 2009 membuktikan KP U dan pemerintah belum melakukan evaluasi secara total dan komprehensif untuk mencari akar persoalan yang sejatinya. Realitas menujukkan kinerja KPU dan pemerintah masih jauh dari harapan.

*Kedua***,** keterbatasan waktu yang disediakan dalam memproses DPT juga menjadi bagian dari penyebab kekeliruan dalam perbaikan data pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumumnan hasil perbaikan DPS sampai penetapan hasil DPT. *Ketiga*, tidak adanya komunikasi yang baik antar KPU dengan lembaga-lembaga pemantau, lembaga pengawas, tim kampanye sehingga setiap temuan tercecernya DPT tidak segera ditindaklanjuti.

Keempat, kurang terlibatnya secara aktif para peserta pemilu dalam mengawal dan mengevaluasi hasil pendataan. Kekisruhan atau protes muncul setelah ditetapkan menjadi DPT dan terjadi dalam hitungan hari menjelang pilpres. Dan, *kelima*, KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu belum bersikap netral. Sosialisasi yang dilakukan KPU melalui spanduk dan poster mengarahkan dukungan pada salah satu pasangan capres cawapres tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Dja'far. 1983. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Askuri. 2007. *Panduan Pendidikan Pemilih, Mengantarkan Pemilih Cerdas*. Jogjakarta: KPU DIY.

Flourney, Don Michael. 1989. *Analisis Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Hikam, Muhammad AS. 1999. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Perdana.

Klaus, Krippendorf. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press.

Mc Quail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Oetama, Jacob. 1996. *Pers Sebagai Lembaga Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Pantja Simpati

Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Suratkabar:

Kompas, 2 Juli 2009

Radar Jogja, 11 Juli 2009